

**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL
TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA
DENGAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

PRATIWI NURUL AINI

NIM. 12030111130072

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Pratiwi Nurul Aini
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130072
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL
TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA
DENGAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si, Akt

Semarang, 26 Januari 2015

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si.,Akt

NIP. 19620416 198803 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Pratiwi Nurul Aini
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130072
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL
TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA
DENGAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 4 Maret 2015

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt (.....)
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Marsono, S.E., M.Adv.Acc., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Pratiwi Nurul Aini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela dengan Efektivitas Komite Audit sebagai Variabel Moderasi**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,

Pratiwi Nurul Aini

NIM. 12030111130072

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of managerial ownership on voluntary disclosure with audit committee effectiveness as a moderating variable. An audit committee effectiveness is embedded in independence and expertise of audit committee. Firm size used as control variable.

The population used in this study is non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013 with a total sample of 84 companies. The sampling method used in this study is purposive sampling. The data used is secondary data that are annual report in 2013. This study uses the technique of multiple linear regression analysis.

The empirical result of this study show that managerial ownership have positively significant influenced on voluntary disclosure. Managerial ownership moderated by independence and expertise of audit committee shows higher voluntary disclosure.

Keyword : *voluntary disclosure, managerial ownership, corporate governance, audit committee effectiveness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela dengan efektivitas komite audit sebagai variabel moderasi. Efektivitas komite audit terkait dengan independensi dan keahlian komite audit. Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *non-financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 dengan total sampel sebanyak 84 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Selain itu kepemilikan manajerial yang dimoderasi oleh independensi komite audit dan keahlian komite audit menghasilkan pengungkapan sukarela yang lebih tinggi.

Kata kunci : pengungkapan sukarela, kepemilikan manajerial, tata kelola perusahaan, efektivitas komite audit.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila
engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh bekerja (urusan), dan hanya kepada Tuhanmu lah
hendaknya engkau berharap.*

(Q.S. al –Insyirah 5-8)

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

(Q.S. al –Baqarah 216)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak,Ibu dan Kakakku tercinta
Sahabat dan teman – teman ku sayang
Keluarga besar Akuntansi 2011

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA DENGAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari pihak-pihak lain baik dari segi materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini :

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Bapak Dr. H. Raharja M.Si., Akt selaku dosen wali.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmunya sehingga berguna bagi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta (Bapak Djalal Er Riyanto dan Ibu Atik Mawarni), Kakakku Ganang serta keluarga besarku, terima kasih atas doa, dorongan, dan nasihat yang diberikan kepada penulis.

7. Mbak Shika Arum, Mbak Nurani Prasetianti dan Mas Andrian Budi Prasetyo. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabatku, Dila, Vanessa, Ega, Nia, Rista, Mbak Dayu, Izzani, Herdian, Willy, Gati dan seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2011. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
9. Teman-teman satu perjuangan, Rista, Nia, Nonie, Iwana, Nindi, Rusti, Nita, Novita, Rezky, Septi, Titis dan Tika. Terima kasih atas nasihat dan masukan yang diberikan pada saat melakukan diskusi bersama.
10. Nia, Rieza, Azka, Ayu, Sarah, Kamalia, Ririn, Faila, Riang, Wendy dan semua anak-anak Sapi Senam, terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Desa Progowati tahun 2014, Mas Hantoro, Mas Adit, Mas Sondi, Thoriq, Lana, Lilis, Wiwin, Eteng, Ami, Ulin dan Sandy, terima kasih atas persahabatan yang mengesankan selama KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Teori Agensi.....	11
2.1.2 Pengungkapan Sukarela	16
2.1.3 Kepemilikan Manajerial.....	19
2.1.4 Komite Audit	20
2.1.5 Efektivitas Komite Audit	25

2.1.5.1 Independensi Komite Audit	26
2.1.5.2 Keahlian Komite Audit	27
2.1.6 Penelitian Terdahulu	27
2.2 Kerangka Pemikiran	31
2.3 Pengembangan Hipotesis	34
2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela	34
2.3.2 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela.....	36
2.3.3 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	40
3.1.1 Variabel Dependen.....	40
3.1.2 Variabel Independen	41
3.1.3 Variabel Moderasi.....	42
3.1.3.1 Independensi Komite Audit	42
3.1.3.2 Keahlian Komite Audit	44
3.1.4 Variabel Kontrol	44
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.4 Metode Pengumpulan Data	46
3.5 Metode Analisis	46
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	46
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	47
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas.....	49
3.5.2.3 Uji Heteroskedasitas	49

3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	50
3.5.3 Analisis Regresi Berganda.....	51
3.5.4 Pengujian Hipotesis	51
3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	51
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
3.5.4.3 Uji t (parsial).....	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	54
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	54
4.2 Analisis Data.....	55
4.2.1 Statistik Deskriptif	55
4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	59
4.2.3.2 Uji Multikolinieritas	61
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	62
4.2.3.4 Uji Autokorelasi.....	64
4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis	65
4.2.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	65
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	66
4.2.4.3 Model dan Uji t.....	67
4.3 Interpretasi Hasil	70
4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela	70
4.3.2 Pengaruh Komite Audit Independen sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela.....	71
4.3.3 Pengaruh Keahlian Komite Audit sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela.....	73

4.3.4 Variabel Kontrol	73
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan.....	76
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Variabel.....	44
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	54
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik	56
Tabel 4.3 One Sample Kolmogrov-Sminorv Test.....	61
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser	63
Tabel 4.6 Hasil Run Test.....	64
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi	67
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	68
Tabel 4.10 Ringkasan Uji Hipotesis	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	34
Gambar 4.1 Histogram Normalitas	60
Gambar 4.2 Normal Probability Plot	60
Gambar 4.3 Scatterplot.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN	80
LAMPIRAN B STATISTIK DESKRIPTIF	83
LAMPIRAN C UJI NORMALITAS	84
LAMPIRAN D UJI MULTIKOLINEARITAS	86
LAMPIRAN E UJI HETEROSKRDATISITAS	87
LAMPIRAN F UJI AUTOKORELASI.....	88
LAMPIRAN G UJI REGRESI	89
LAMPIRAN H Indeks Pengungkapan Sukarela.....	91
LAMPIRAN I TABULASI DATA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang masalah akan dibahas mengenai hal-hal yang menyebabkan dilakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela dengan efektivitas komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan *non-financial* di Indonesia. Latar belakang tersebut kemudian digunakan sebagai landasan rumusan penelitian yang akan menjadi fokus penelitian.

Bagian selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Bagian tujuan berisi tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian yang dilakukannya. Kegunaan penelitian berisi tentang manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh berbagai pihak. Serta bagian terakhir adalah sistematika penulisan yang akan diuraikan pada bab ini.

1.1 Latar Belakang

Isu tentang pengungkapan perusahaan dan *corporate governance* telah menarik perhatian dari berbagai pihak. Peningkatan perhatian terhadap isu pengungkapan terjadi karena adanya peran penting dari informasi yang diungkapkan perusahaan terhadap pengambilan keputusan-keputusan. Pihak pembuat kebijakan dan badan pengaturan menggunakan informasi tersebut

sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan melakukan pengaturan yang berhubungan dengan perusahaan. Sedangkan bagi para investor dan calon investor, informasi yang diungkapkan perusahaan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Di sisi lain, pengungkapan perusahaan juga memberikan manfaat bagi perusahaan di masa depan karena dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Peningkatan nilai perusahaan di masa depan dapat diperoleh ketika tingkat pengungkapan informasi perusahaan tinggi. Semakin tinggi pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan maka tingkat transparansi juga meningkat. Transparansi pada laporan tahunan perusahaan dapat mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen perusahaan dengan investor eksternal perusahaan. Hal ini karena investor eksternal memiliki informasi yang cukup untuk digunakan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Adanya informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan tersebut pada akhirnya dapat menurunkan biaya agensi serta meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian tentang pengungkapan oleh Fan dan Wong (2002) membuktikan bahwa transparansi dan pengungkapan perusahaan di Asia Timur relatif rendah. Krisis Keuangan Asia Timur tahun 1997 telah menimbulkan kesadaran di antara pelaku bisnis di wilayah tersebut tentang pentingnya transparansi dan pengungkapan perusahaan. Badan-badan pengaturan di berbagai negara telah melakukan tindakan untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Meskipun badan-badan pengaturan telah melakukan berbagai usaha dengan sungguh-sungguh, perusahaan-perusahaan *listing* tidak

menunjukkan perbaikan signifikan dalam tingkat pengungkapan (Kee dan Pillay, 2003 dalam Akhtaruddin dan Haron 2010). Adopsi terhadap standar akuntansi internasional dan peraturan-peraturan pengungkapan wajib lainnya dilakukan tanpa adanya pertimbangan sikap manajer terhadap pengungkapan sukarela sehingga tidak akan memperbaiki pengungkapan perusahaan.

Di Indonesia sampai tahun 2013 masih terdapat 30 kasus pelanggaran pasar modal yang ditangani oleh OJK dari Januari 2013 hingga 13 Agustus 2013. Dari 30 kasus tersebut terdapat 19 kasus yang terkait dengan benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan (OJK, 2013). Adanya masalah dalam hal benturan kepentingan dan tidak diungkapkannya informasi penting dapat merugikan berbagai pelaku ekonomi khususnya para investor.

Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI, 2006 dalam Utami *et al.*, 2012) mempublikasikan sebuah survei yang dilakukan oleh *PricewaterhouseCoopers* pada tahun 1999 terhadap investor internasional di Asia, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada salah satu yang terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi.

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan tentang jenis informasi minimum yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia pengungkapan wajib diatur oleh BAPEPAM dalam Keputusan

Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP 134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 7 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan tentang informasi tambahan dari yang diwajibkan. Perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan akan melakukan pengungkapan sukarela atau tidak. Permintaan terhadap pengungkapan sukarela mengalami peningkatan karena salah satu kontribusinya dalam mengurangi masalah agensi antara manajer dan investor eksternal perusahaan (Fama dan Jensen, 1983).

Masalah agensi terjadi ketika terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemilik perusahaan atau investor (prinsipal). Manajer perusahaan yang mengetahui informasi internal lebih banyak dibandingkan investor cenderung memilih untuk tidak mengungkapkan informasi yang bersifat penting dan rahasia. Sedangkan para investor menginginkan adanya pengungkapan yang transparan dan lengkap sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis dan melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Dengan adanya pengungkapan sukarela yang lebih luas, maka dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada investor.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan. Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010) kepemilikan manajerial sebagai salah satu variabel *corporate governance* mencerminkan pengaruh dari pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan pengungkapan perusahaan. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan pada perusahaan bervariasi secara sistematis dengan tingkat kepemilikan manajerial.

Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen sehingga biaya agensi akan muncul. Menurut Jensen dan Meckling (1976), cara yang digunakan untuk mencegah asimetri informasi dan perilaku *moral hazard* adalah dengan membuat perjanjian untuk memberikan insentif yang berupa kompensasi keuangan yang diperhitungkan sebagai biaya agensi sehingga manajer akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan sukarela dengan tujuan untuk mengurangi biaya agensi. Beberapa jenis biaya yang termasuk dalam biaya agensi adalah biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal.

Mujiyono dan Nany (2010) mengatakan bahwa faktor manfaat dan biaya memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan pengungkapan. Manfaat pengungkapan tersebut diperoleh karena pengungkapan informasi perusahaan akan membantu investor dan kreditor dalam memahami kondisi perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Manajemen bersedia mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih tinggi dari biayanya (Mujiyono dan Nany, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Juhmani (2013) meneliti struktur kepemilikan dan pengungkapan sukarela (studi empiris perusahaan-perusahaan terdaftar di Bahrain). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan *blockholder* berhubungan negatif dan signifikan dengan

pengungkapan sukarela. Variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak signifikan dalam menjelaskan adanya variasi tingkat pengungkapan sukarela.

Hasil penelitian Barros, *et al.* (2013) pada perusahaan-perusahaan *non-financial* di Perancis menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan meningkat dengan kepemilikan manajerial, independensi dewan dan komite audit, frekuensi pertemuan dewan, dan kualitas audit eksternal. Variabel lainnya yaitu frekuensi pertemuan komite audit dan ketekunan dewan dan pengauditan berhubungan dengan penurunan pengungkapan. Sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih besar, lebih menguntungkan, dan perusahaan dengan sedikit hutang mempunyai tingkat pengungkapan sukarela yang lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabor dan Suardana (2014) menguji pengaruh struktur kepemilikan dan *proprietary cost* terhadap luas pengungkapan sukarela pada seluruh perusahaan yang *listing* di BEI tahun 2012. Hasilnya adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan. Sedangkan *proprietary cost* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Penelitian sebelumnya juga meneliti variabel komite audit sebagai variabel *corporate governance* lain yang diperkirakan memiliki hubungan dengan pengungkapan sukarela. Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010) efektivitas komite audit menjadi hal yang sangat penting karena komite audit saja dianggap belum mampu untuk mengontrol masalah agensi dan meningkatkan kualitas

pengungkapan perusahaan. Efektivitas komite audit melekat pada independensi komite audit dan keahlian komite audit. Independensi komite audit dapat mengurangi bentuk interferensi dari manajemen yang memiliki saham perusahaan yang dapat mempengaruhi independensinya, sedangkan keahlian komite audit dapat memberikan kontribusi pada efektivitas komite audit dalam melakukan pengawasan pengungkapan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan tahunan perusahaan untuk pengambilan keputusan bisnis.

Akhtaruddin dan Haron (2010) meneliti tentang kepemilikan dewan, efektivitas komite audit, dan pengungkapan sukarela pada perusahaan-perusahaan *non-finacial* di Malaysia. Efektivitas komite audit dalam penelitian ini menggunakan variabel independensi komite audit dan variabel keahlian anggota komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Variabel independensi komite audit terbukti dapat memperlemah hubungan kepemilikan dewan dengan pengungkapan sukarela. Sedangkan variabel keahlian anggota dewan tidak signifikan dalam menjelaskan variasi tingkat pengungkapan sukarela.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela perusahaan dengan efektivitas komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian dalam skripsi ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Akhtaruddin dan Haron (2010) yang menggunakan sampel penelitian 124 perusahaan *non-finacial* di Malaysia tahun 2003. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan

tahun penelitian. Penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan *non-financial* di Indonesia tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap *voluntary disclosure*. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?
2. Apakah independensi komite audit dapat memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela?
3. Apakah keahlian komite audit dapat memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela.
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis independensi komite audit yang dapat memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela.
3. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis keahlian komite audit yang dapat memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan, dapat membantu untuk menyumbangkan pemikiran tentang item-item penting dalam pengungkapan sukarela laporan tahunan yang dapat memberikan manfaat bagi para pengguna.
2. Memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dan memperkuat pengaruh suatu faktor terhadap pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunannya melalui model yang komprehensif dan teruji secara empiris sesuai kondisi yang berlaku di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis informasi yang bersifat sukarela.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai faktor-faktor karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan *non-financial* di Indonesia. Kemudian dari landasan teori tersebut dapat terbentuk hipotesis dan kerangka penelitian yang melandasi penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian tentang pengungkapan sukarela, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian tentang pengungkapan sukarela, deskripsi daerah penelitian, dan identitas sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang analisis data dan interpretasi data berdasarkan alat dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan ini, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang tentang pengungkapan sukarela.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai : (i) Teori agensi yang menjadi landasan teori penelitian ini, dan konsep-konsep mengenai karakteristik *corporate governance*, dan konsep-konsep mengenai pengungkapan sukarela serta penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (ii) kerangka penelitian, dan (iii) pengembangan hipotesis yang akan diuraikan dalam bab ini.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasar pada teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat suatu perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Cara yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan tersebut adalah dengan menerapkan *corporate governance*.

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi diantara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Hubungan tersebut dijelaskan oleh Hendriksen dan Breeda (2001) sebagai berikut :

“One of these individuals is an agent for another called a principal-hence the title of agency theory. The agent contracts to perform certain duties for the principal; the principal contracts to reward the agent. An analogy may be drawn between owners of a business and the management of that business.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa hubungan keagenan melibatkan dua pihak yaitu antara pihak agen dan pihak prinsipal. Pihak agen memiliki kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu demi kepentingan prinsipal, sedangkan prinsipal memiliki kontrak untuk memberikan imbalan kepada agen. Dalam suatu perusahaan, pihak yang dinamakan agen adalah manajemen perusahaan dan pihak yang dinamakan prinsipal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham.

Menurut Hendriksen dan Breeda (2001) para pemilik disebut evaluator informasi dan pihak agen disebut pengambil keputusan. Evaluator informasi memiliki tanggung jawab untuk memilih sistem informasi sehingga para pengambil keputusan dapat membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka. Semua tindakan dilakukan oleh agen, sedangkan fungsi utilitas untuk kepentingan akhir adalah milik prinsipal. Masalah ini diperumit dengan adanya kebutuhan untuk juga memperhitungkan fungsi utilitas agen karena fungsi ini yang menggerakkan tindakan agen (Hendriksen dan Breda, 2001).

Menurut Sabeni (2005) kontrak kerja adalah seperangkat aturan mengenai proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mekanisme bagi hasil yang telah disetujui oleh pihak agen dan prinsipal. Kontrak kerja yang optimal dapat tercapai ketika suatu kontrak kerja dapat menyeimbangkan prinsipal dan agen melalui pelaksanaan kewajiban agen yang optimal dan pemberian insentif kepada agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori agensi adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997 dalam Sabeni 2005).

Eisenhard (1989) menyatakan bahwa terdapat tiga asumsi yang menjadi landasan teori agensi, yaitu asumsi manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi manusia menjelaskan tentang tiga sifat dasar manusia yang terdiri dari sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self-interest*), sifat manusia dengan keterbatasan rasional (*bounded rationality*), dan sifat manusia yang cenderung menghindari risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian menjelaskan tentang adanya konflik tujuan diantara anggota perusahaan, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara principal dan agen. Sedangkan asumsi informasi adalah informasi sebagai suatu komoditas yang dapat dibeli.

Sifat dasar manusia untuk mementingkan diri sendiri dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan dari masing-masing pihak melalui dividen yang diterima prinsipal dan kompensasi yang diterima agen. Perbedaan kepentingan dan pemisahan kepemilikan perusahaan yang terjadi antara pemilik (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) dapat menimbulkan konflik. Penyatuan kepentingan ini sering menimbulkan masalah keagenan yang disebut dengan konflik agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Hal tersebut menyebabkan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, yaitu terdapat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Di satu sisi prinsipal mengharapkan adanya informasi yang lengkap dalam laporan

keuangan untuk digunakan dalam memonitor dan mengendalikan tindakan para manajer. Sedangkan di sisi lain manajer akan menyembunyikan informasi yang memiliki pengaruh buruk terhadap kepentingan dirinya. Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tidak dapat melakukan penilaian terhadap kinerja agen dalam mengelola kekayaan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan terdapat dua permasalahan yang timbul akibat adanya asimetri informasi, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*.

Moral hazard adalah suatu permasalahan yang timbul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Dalam kondisi ini, prinsipal memiliki informasi yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan-kegiatan agen secara penuh. *Adverse selection* adalah suatu keadaan dimana prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup untuk dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pemilik akan membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan dirinya ketika perusahaan yang kepemilikannya tunggal di kelola oleh pemilik. Namun apabila pemilik yang merangkap sebagai manajer (*owner manager*) ini menjual sebagian sahamnya kepada pihak luar, biaya agensi akan muncul karena terdapat perbedaan antara kepentingan *owner manager* dengan kepentingan pemegang saham. Biaya agensi yang timbul di antaranya adalah biaya monitoring yang dilakukan oleh pihak prinsipal. Pihak manajemen harus dapat mengurangi biaya

agensi yang timbul untuk meningkatkan nilai perusahaan. Biaya agensi terdiri dari tiga jenis:

1. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
2. *The bonding expenditures by the agent (Bonding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang merugikan prinsipal.
3. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas atau penurunan kesejahteraan prinsipal maupun agen karena adanya *agency relationship*.

Cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi biaya agensi dan *agency problem* adalah dengan melakukan pengungkapan informasi perusahaan dan dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Perusahaan dengan tingkat transparansi yang rendah akan menanggung biaya agensi yang besar (Randoy dan Goel, 2003). Menurut Healy dan Palepu (2001), terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi *agency problem*:

1. Memaksimalkan kontrak antara investor dan manajemen perusahaan. Contohnya adalah pembuatan kontrak pemberian kompensasi kepada pihak manajer dengan tujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara investor dengan manajemen perusahaan. Kontrak tersebut mewajibkan manajer untuk mengungkapkan informasi relevan yang memungkinkan investor dapat memonitor kepatuhan manajemen terhadap kontrak yang disepakati dan mengawasi pengelolaan sumber daya perusahaan.

2. Mengoptimalkan fungsi dewan komisaris. Tugas dewan komisaris adalah mewakili kepentingan para pemilik modal dengan mengawasi kinerja manajer dalam melakukan fungsi pengelolaan perusahaan, sehingga mampu mencegah munculnya kebijakan yang merugikan pemilik modal.
3. Memaksimalkan keberadaan *intermediaries*. Informasi *intermediaries* seperti analisis keuangan dan lembaga pemeringkat dapat meningkatkan kualitas informasi yang diungkapkan oleh manajemen karena penilaian atas kinerja perusahaan yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan bersifat lebih objektif.

2.1.2 Pengungkapan Sukarela

Laporan tahunan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh *stakeholders* untuk mengumpulkan informasi perusahaan. Menurut Binh (2012) peran utama dari laporan tahunan perusahaan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, *useful* dan *reliable* bagi investor, pemegang saham, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan sehingga informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengguna laporan tahunan. Se jauh mana informasi dapat diperoleh tergantung pada se jauh mana keterbukaan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) pada pelaporan keuangan emiten.

Menurut Hendriksen dan Breda (2001) terdapat beberapa alasan yang diajukan perusahaan atas penolakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih yaitu :

1. Para pesaing akan memperoleh manfaat dan pemegang saham mengalami kerugian dari pengungkapan yang dilakukan perusahaan.
2. Serikat kerja menggunakan pengungkapan perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tawar menawar upah pegawai.
3. Investor diperkirakan tidak dapat memahami kebijakan akuntansi dan prosedur sehingga melakukan pengungkapan penuh hanya akan menyesatkan.
4. Informasi keuangan memerlukan biaya yang lebih tinggi jika disediakan secara langsung oleh perusahaan daripada jika informasi tersebut diperoleh dari sumber lain.
5. Pengetahuan terhadap kebutuhan investor masih sangat kurang.

Tiga konsep pengungkapan (*disclosure*) yang umumnya dikemukakan (Ghozali dan Chariri, 2007) yaitu:

1. Cukup

Tingkat pengungkapan yang cukup adalah pengungkapan yang harus dipenuhi agar tidak menyesatkan bagi pemakai dalam mengambil keputusan.

2. Wajar

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan

3. Penuh

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan

penyajian informasi secara melimpah. Sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik.

Informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan tentang jenis informasi minimum yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia pengungkapan wajib diatur oleh BAPEPAM dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP 134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 7 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan tentang informasi tambahan dari yang diwajibkan. Perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan akan melakukan pengungkapan sukarela atau tidak. Permintaan terhadap pengungkapan sukarela mengalami peningkatan karena kontribusinya terhadap nilai ekuitas (Healy dan Palepu, 1993 dalam Akhtaruddin dan Haron, 2010), Likuiditas pasar (Diamond and Verrecchia, 1991), biaya modal (Botosan, 1997), serta mengurangi masalah agensi antara manajer dan investor eksternal perusahaan (Fama dan Jensen, 1983).

Keputusan pengungkapan perusahaan diambil oleh manajemen perusahaan. Mujiyono dan Nany (2010) mengatakan bahwa faktor manfaat dan biaya memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan pengungkapan. Manajemen bersedia mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih tinggi dari biayanya (Mujiyono dan Nany, 2010). Terdapat dua jenis biaya pengungkapan informasi :

1. Biaya pengungkapan langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan menyajikan informasi. Biaya tersebut terdiri dari biaya pengumpulan, biaya pemrosesan, biaya pengauditan dan biaya penyebaran informasi.
2. Biaya pengungkapan tidak langsung adalah biaya yang timbul akibatnya diungkapkan dan atau tidak diungkapkannya informasi. Biaya tersebut terdiri dari biaya litigasi dan biaya *propriety* / biaya *competitive disadvantage*. Biaya litigasi adalah biaya yang timbul karena pengungkapan informasi yang menyesatkan, sedangkan biaya *propriety* ialah biaya yang timbul akibat diterbitkannya laporan keuangan yang justru akan digunakan pesaing melakukan *positioning*, sehingga dapat melemahkan posisi perusahaan yang melakukan pengungkapan.

Selain itu, pengawasan terhadap pengambilan keputusan pengungkapan oleh manajemen juga mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan. Semakin besar pengawasan terhadap manajemen perusahaan, semakin besar pula tingkat pengungkapan yang dilakukan (Akhtaruddin dan Haron, 2010).

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah besar proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen suatu perusahaan. Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010) kepemilikan manajerial sebagai salah satu variabel *corporate governance* mencerminkan pengaruh dari pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan pengungkapan perusahaan. Pemberian saham kepada manajemen perusahaan merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh perusahaan untuk

menyelaraskan kepentingan pihak prinsipal dan agen. Eng dan Mak (2003) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial rendah, maka potensi timbulnya masalah agensi akan semakin besar. Kepemilikan manajerial dapat menurunkan biaya agensi karena konflik agensi antara prinsipal dan agen semakin berkurang dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin besar kemauan manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari pemegang saham. Menurut Barros, *et al.* (2013) para manajer akan mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya agensi yaitu biaya pengawasan yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mencegah terjadinya masalah agensi.

2.1.4 Komite Audit

Komite Audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenang dewan komisaris secara efektif. Dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002, disebutkan bahwa Komite Audit merupakan suatu badan yang berada di bawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya serta bertanggung jawab secara langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu:

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012 pada Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, terdapat Ketentuan yang berkaitan dengan Keanggotaan Komite Audit yaitu Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Peran Komite Audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002 dalam Aggarini, 2010). Beberapa tugas komite audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan yang disampaikan oleh Dewan Direksi, melakukan identifikasi terhadap segala hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
 - c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
 - d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan
- Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai

berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Anggarini (2010) menyatakan bahwa kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dewan komisaris. Contoh dari hak kuasa eksplisit yang diberikan oleh dewan komisaris adalah mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam Piagam Komite Audit.

Setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Piagam Komite Audit adalah dokumen formal sebagai bentuk komitmen Komisaris dan Dewan untuk menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam Komite Audit yang telah disahkan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Komite Audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam Komite Audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite Audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen Komisaris dan Dewan Direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002 dalam Anggarini, 2010).

Adapun persyaratan Keanggotaan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

- mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 - j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.1.5 Efektivitas Komite Audit

Efektivitas komite audit berkaitan erat dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Keterkaitan tersebut didasarkan pada logika bahwa pembentukan komite audit bertujuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga akan meningkatkan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan yang dilakukan oleh manajemen. Berdasarkan teori keagenan, peran komite audit adalah untuk mengurangi asimetri informasi, oportunisme manajerial, dan meningkatkan kualitas pelaporan. Komite audit bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen dan praktik pelaporan yang

dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan maupun laporan tahunan.

Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010), efektivitas komite audit melekat pada independensi dan keahlian dari para anggotanya.

2.1.5.1 Independensi Komite Audit

Independensi komite audit diukur dengan proporsi komisaris independen dalam komite audit. Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012 pada Peraturan Nomor IX.1.5 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan :

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010) formasi komite audit dengan jumlah komisaris independen yang lebih banyak mengindikasikan terdapat lebih sedikit bentuk interferensi manajemen dalam melatih independensi dari anggota-anggota komite audit. Selain itu, independensi komite audit juga dapat menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik.

2.1.5.2 Keahlian Komite Audit

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 menyebutkan bahwa komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010) keahlian para anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan diperkirakan dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas komite audit.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *corporate governance* dan pengungkapan sukarela telah dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan. Meskipun memperoleh beberapa hasil berbeda, namun beberapa poin penting dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Akhtaruddin dan Haron (2010) meneliti tentang pengaruh kepemilikan dewan dan efektivitas komite audit terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kepemilikan dewan berpengaruh negatif dengan pengungkapan sukarela, hubungan negatif antara

kepemilikan dewan dan pengungkapan sukarela menjadi lebih lemah pada perusahaan dengan jumlah komisaris independen dalam komite audit yang lebih banyak. Selain itu interaksi antara kepemilikan dewan dan anggota-anggota ahli dalam komite audit terhadap pengungkapan sukarela menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.

Barros, *et al.* (2013) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, independensi komite audit dan dewan, frekuensi pertemuan dewan, serta kualitas audit eksternal berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Omar Juhmani (2013) menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan perusahaan. Hasilnya adalah kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Selain itu kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Nabor dan Suardana (2014) menguji pengaruh struktur kepemilikan dan *proprietary cost* terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasilnya adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan. Sedangkan *proprietary cost* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Alat Statistik	Variabel	Hasil
1.	Akhtaruddin dan Haron (2010)	Analisis regresi berganda	<p>Variabel dependen :</p> <p>Tingkat pengungkapan sukarela</p> <p>Variabel independen :</p> <p>Kepemilikan dewan</p> <p>Variabel moderasi :</p> <p>independensi komite audit, keahlian komite audit</p> <p>Variabel kontrol :</p> <p><i>Audit firm</i>, Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i>, <i>Current ratio</i>, ROE</p>	<p>Kepemilikan dewan berhubungan negatif dengan pengungkapan sukarela.</p> <p>Hubungan negatif antara kepemilikan dewan dan pengungkapan sukarela menjadi lebih lemah pada perusahaan dengan jumlah komisaris independen dalam komite audit yang lebih banyak.</p> <p>Interaksi antara kepemilikan dewan dan keahlian komite audit terhadap pengungkapan sukarela menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.</p>
2.	Barros <i>et al.</i> , (2013)	Regresi Linear	<p>Variabel dependen :</p> <p>Luas pengungkapan</p>	<p>Kepemilikan manajerial, independensi komite</p>

		Berganda	<p>sukarela</p> <p>Variabel independen :</p> <p>Kepemilikan manajerial, direktur independen dalam dewan, direktur independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, frekuensi pertemuan dewan, partisipasi dalam pertemuan dewan, kualitas audit.</p> <p>Variabel kontrol : profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan.</p>	<p>audit dan dewan, frekuensi pertemuan dewan, kualitas audit eksternal berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.</p> <p>Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela.</p>
3.	Omar Juhmani (2013)	Analisis Regresi Berganda	<p>Variabel dependen :</p> <p>Tingkat pengungkapan sukarela</p> <p>Variabel independen : kepemilikan <i>blockholder</i>, kepemilikan manajerial,</p>	<p>Kepemilikan <i>blockholder</i> berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.</p> <p>Kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan</p>

			kepemilikan pemerintah Variabel kontrol : Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas	sukarela.
4.	Nabor dan Suardana (2014)	Analisis Regresi Berganda	Variabel dependen : Luas pengungkapan sukarela Variabel independen : <i>proprietary cost</i> , kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional	<i>Proprietary cost</i> berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Sumber : berbagai penelitian terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian Barros *et al.*, (2013) dan Akhtaruddin dan Haron (2010) untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela dengan efektivitas komite audit sebagai variabel moderasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel serta alasan penyajian gambar akan dijelaskan mengenai sub-bab kerangka pemikiran ini.

Pengungkapan sukarela menarik perhatian dari berbagai pihak karena adanya peran penting dari informasi yang diungkapkan perusahaan terhadap pengambilan keputusan-keputusan. Selain itu, pengungkapan sukarela juga memberikan manfaat bagi perusahaan di masa depan karena dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai praktik perusahaan terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan secara sukarela. Sesuai dengan penelitian Akhtaruddin dan Baron (2010) yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dan efektivitas komite audit. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat menurunkan biaya agensi karena konflik agensi antara prinsipal dan agen semakin berkurang dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan.

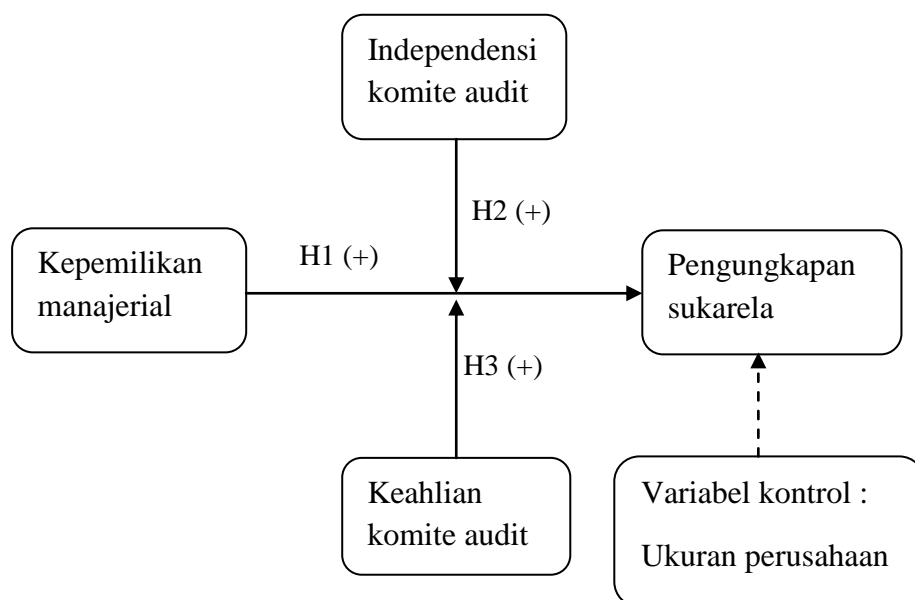
Efektivitas komite audit berkaitan dengan independensi dan keahlian dari para anggotanya. Formasi komite audit dengan komisaris independen yang lebih banyak mengindikasikan terdapat lebih sedikit bentuk interferensi manajemen dalam melatih independensi dari anggota-anggota komite audit. Selain itu, independensi komite audit juga dapat menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Sedangkan keahlian para anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan diperkirakan dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas komite audit. Efektivitas komite audit dapat memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini memberikan perubahan variabel dependen yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan log dari aset perusahaan yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah pada akhir tahun 2013.

Kepemilikan manajerial dilihat melalui besar proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi. Independensi komite audit diukur dengan proporsi dewan komisaris dalam komite audit. Sedangkan keahlian komite audit diukur dengan proporsi anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan.

Pengungkapan informasi secara sukarela mengenai kinerja perusahaan merupakan hal yang penting bagi *stakeholders*. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik cenderung mengungkapkan banyak informasi secara sukarela dalam laporan tahunan. Pengungkapan ini dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian. Ada tiga hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain: (i) terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela, (ii) independensi komite audit memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela, dan (iii) keahlian komite audit memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela. Berikut akan dijelaskan mengenai pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela

Penelitian terhadap variabel kepemilikan manajerial dihubungkan dengan teori agensi. Pemisahan kepemilikan dan fungsi pengendalian dipertimbangkan oleh para peneliti dan praktisi sebagai penyebab utama dari konflik yang terjadi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah agensi muncul ketika pemilik (prinsipal) mempekerjakan seorang manajer (agen) untuk menjalankan perusahaan tetapi manajer tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini mendorong manajer untuk melakukan aktivitas yang dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Aktivitas tersebut contohnya menyajikan informasi laba perusahaan secara berlebihan, melalaikan tanggung jawabnya, dan *empire building*. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa manajer memiliki dorongan untuk tidak memberikan informasi kepada pihak luar perusahaan demi keuntungan pribadinya sendiri.

Kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan persentase kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan dewan direksi yang ditunjukkan dalam catatan laporan keuangan. Menurut Juhmani (2013), dalam rangka menyelaraskan kepentingan antara pemilik dan agen (manajer), solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sebagian saham perusahaan kepada manajer. Ketika manajer menjadi bagian dari pemegang saham perusahaan, mereka akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menyebabkan naiknya kekayaan pemegang saham. Peningkatan kekayaan pemegang saham pada akhirnya juga akan menyebabkan kekayaan manajer naik. Oleh karena itu, pengungkapan informasi meningkat karena manajer sebagai pemegang saham dalam jumlah besar dapat memperoleh keuntungan dari harga pasar saham yang tinggi, yang

diperoleh dengan cara menurunkan biaya agensi yang harus ditanggung oleh perusahaan melalui pengungkapan informasi yang lebih baik. Ketika manajer memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik perusahaan (investor), maka manajer akan mengungkapkan lebih banyak informasi.

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik agensi antara manajer dan pemegang saham sehingga biaya agensi dapat menurun (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik agensi dapat berkurang karena adanya keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Menurut Barros, *et al.* (2013) manajer dengan kepemilikan yang tinggi memiliki sedikit dorongan untuk melakukan tindakan demi keuntungan pribadinya. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin besar kemauan manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari pemegang saham. Para manajer akan mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya agensi yaitu biaya pengawasan yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mencegah terjadinya masalah agensi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.3.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela

Corporate governance juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan pemegang saham dan manajemen dari sebuah perusahaan. Fokus dari *corporate*

governance terletak pada transparansi, pengungkapan, pengendalian internal, dan akuntabilitas. Selain kontrol kepemilikan, komite audit adalah variabel *corporate governance* utama lain yang dipandang sebagai mekanisme pengendalian internal pusat yang membantu mengontrol masalah agensi antara manajer dan investor luar. Teori keagenan berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Pemantauan dari perspektif teori agensi menunjukkan bahwa kualitas pemantauan pengungkapan perusahaan yang semakin baik terkait dengan masuknya direktur yang lebih independen pada komite audit (Collier dan Gregory, 1999).

Penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2010) mengindikasikan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap hubungan kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela akan semakin diperkuat apabila pemantauan terhadap pengungkapan perusahaan dilakukan oleh komite audit yang lebih independen. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan menjadikan manajemen termotivasi untuk menaikkan nilai perusahaan dengan melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini akan semakin mendukung apabila perusahaan tersebut memiliki komite audit yang lebih independen.

Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010) komite audit independen yang tercermin dalam formasi komite audit dengan jumlah komisaris independen yang lebih banyak dapat mengurangi bentuk interferensi dari pihak manajemen dan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Anggota komite audit

yang independen akan memastikan pengungkapan informasi perusahaan yang lebih berkualitas karena dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemantauan terhadap pengungkapan perusahaan dengan baik ketika bentuk interferensi manajemen kecil.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Independensi komite audit memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela.

2.3.3 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela

Teori agensi menunjukkan bahwa peningkatan pemantauan dewan melalui komite audit dapat mengurangi biaya agensi (Chung *et al.*, 2004 dalam Akhtaruddin dan Haron, 2010). Hal tersebut dapat terjadi karena konflik agensi berupa asimetri informasi antara prinsipal dan agen akan berkurang dengan adanya peningkatan pengungkapan informasi perusahaan ketika komite audit melakukan pemantauan terhadap dewan.

Direktur eksternal yang memiliki pengalaman lebih banyak sangat berharga bagi perusahaan. Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010) komite audit dengan proporsi anggota ahli dalam praktik keuangan dan akuntansi yang lebih banyak diharapkan lebih efektif dalam memantau pelaporan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga tingkat pengungkapan sukarela menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Keahlian komite audit memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi dan operasional variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel penelitian yaitu variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan perusahaan secara sukarela yang dinyatakan dalam tingkat pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan data yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan yang berkaitan dengan data tambahan dari pengungkapan wajib.

Variabel pengungkapan sukarela (PS) diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan sukarela berdasarkan *disclosure checklist (Appendix)* pada penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Sodikin (2013). Item-item dalam indeks tersebut kemudian dibandingkan dengan daftar pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP 134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 7 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Indeks pengungkapan meliputi informasi tentang dewan, prospek bisnis,

research and development, informasi karyawan, pelaporan tanggung jawab sosial, perbaikan produk dan jasa, dan informasi tata kelola perusahaan. Daftar item pengungkapan ini dapat dilihat pada Lampiran H.

Pada penelitian ini akan menggunakan indeks tidak tertimbang atau nilai dikotomi, dimana nilai 0 diberikan untuk item yang tidak diungkapkan dan nilai 1 diberikan untuk item yang diungkapkan perusahaan secara sukarela. Indeks tidak tertimbang digunakan karena terdapat dua alasan, yaitu:

1. Setiap pihak yang menggunakan laporan tahunan perusahaan memiliki penilaian berbeda terhadap item informasi yang terdapat di laporan tahunan perusahaan tersebut. Satu pihak menganggap penting suatu item informasi tertentu, tetapi pihak lain dapat menganggap item tersebut tidak penting.
2. Untuk menghindari pemberian bobot terhadap item-item informasi yang bersifat subjektif.

Pengungkapan sukarela dihitung dengan rasio jumlah skor yang diungkapkan perusahaan dibagi skor maksimal. Perusahaan dapat memperoleh skor maksimal 36 item berdasarkan pada nomor informasi yang ditetapkan dalam daftar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Barros, *et al.* (2012) pengungkapan sukarela dirumuskan sebagai berikut:

$$PS = \frac{\text{jumlah skor yang diungkapkan perusahaan}}{\text{skor maksimal}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial yang dilambangkan dengan KM.

Penelitian yang dilakukan oleh Barros, *et al.* (2013) membuktikan bahwa prosentase kepemilikan saham manajerial mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Barros, *et al.* (2013) variabel kepemilikan manajerial diukur dengan prosentase saham yang dimiliki oleh tim *top management*. Pengertian tim *top management* adalah dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini akan diukur dengan prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan seperti yang pernah dilakukan oleh Barros, *et al.* (2013).

$$KM = \frac{\text{saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan}}{\text{saham perusahaan yang beredar}}$$

3.1.3 Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel moderasi yaitu komite audit independen dan keahlian komite audit.

3.1.3.1 Independensi Komite Audit

Independensi komite audit dilambangkan dengan ACI. Variabel ini terkait dengan masuknya komisaris independen dalam formasi komite audit. Menurut Akhtaruddin dan Haron (2010) formasi komite audit dengan jumlah komisaris independen (*independent non-executive director*) yang lebih banyak mencerminkan komite audit yang lebih independen.

Komisaris independen dalam komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris dan merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam hubungan bisnis ataupun hubungan kekeluargaan. Fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan dari komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan antara pihak manajemen, khususnya CEO dan pengelola melalui fungsi monitoring (Suta, 2012). Oleh karena itu komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris dalam komite audit diperkirakan mempunyai peranan lebih banyak dengan melakukan upaya lebih dalam melakukan pemantauan terhadap pengungkapan perusahaan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dari pemilik perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhraruddin dan Haron (2010) membuktikan bahwa independensi komite audit memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dengan luas pengungkapan sukarela perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2012) variabel independensi komite audit diukur dengan prosentase komisaris independen dalam komite audit.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka variabel independensi komite audit dalam penelitian ini akan diukur dengan prosentase komisaris independen dalam komite audit seperti yang pernah dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2012).

$$ACI = \frac{\text{jumlah komisaris independen dalam komite audit}}{\text{jumlah total anggota komite audit}}$$

3.1.3.2 Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit dilambangkan dengan ACE. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2012), variabel keahlian komite audit dalam penelitian ini akan diukur dengan prosentase direktur ahli dalam komite audit. Pengertian direktur ahli disini adalah anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

$$ACE = \frac{\text{jumlah direktur ahli dalam komite audit}}{\text{jumlah anggota komite audit}}$$

3.1.4 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar diprediksi mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan tahunan perusahaan (Wallace, *et al.* 1994 dalam Akhtaruddin dan Haron 2010). Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2010), variabel ukuran perusahaan diukur dengan log dari total aset perusahaan yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah pada akhir tahun 2013. Ukuran perusahaan dilambangkan dengan “FSZE”.

$$FSZE = \log (\text{total aset perusahaan})$$

Tabel 3.1

Tabel Pengukuran Variabel

Variabel	Pred. Sig	Ukuran	Referensi
Variabel Dependen			
PS		Rasio jumlah skor yang diungkapkan perusahaan dibagi skor maksimal.	Penelitian yang dilakukan oleh Barros <i>et al.</i> , (2013)
Variabel Independen			
KM	+	Kepemilikan saham oleh	Penelitian yang dilakukan

		manajemen perusahaan dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar.	oleh Barros <i>et al.</i> , (2013)
Variabel Moderasi			
ACI	+	Proporsi komisaris independen dalam komite audit (dewan komisaris yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, atau anggota yang lain).	Penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2010)
ACE	+	Proporsi direktur ahli dalam komite audit (anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan).	Penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2010)
Variabel Kontrol			
FSZE	+	Log dari total aset perusahaan.	Penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin dan Haron (2010)

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *non-financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *non random sampling* yaitu sampel di ambil dengan cara tidak semua anggota dari populasi di beri kesempatan untuk di pilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang termasuk dalam *non random sampling* salah satunya adalah metode *purposive sampling*. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria.

Dalam penelitian ini kriteria yang diterapkan terhadap pengambilan sampel adalah :

1. Perusahaan yang memiliki informasi tentang kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Perusahaan yang memiliki informasi tentang latar belakang pendidikan dan keahlian anggota komite audit dalam laporan tahunan perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu di www.idx.co.id. Data yang di gunakan berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan *non-financial* yang terdaftar di BEI tahun 2013.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data dari catatan atau basis data yang sudah ada yang berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan, jurnal-jurnal, buku-buku, studi pustaka dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis ini menyajikan data yang disertai dengan perhitungan sehingga informasi mengenai karakteristik data dari perusahaan yang dijadikan sampel menjadi lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Dengan statistik deskriptif dapat diketahui nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi (kemencengan distribusi) dari variabel yang diteliti (Ghozali, 2011).

Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sampel yang akan diteliti bebas dari gangguan multikolinieritas, heteroskedastisitas dan normalitas. Selain itu uji asumsi klasik juga bertujuan untuk memastikan bahwa dapat dilakukan analisis regresi berganda pada sampel yang akan diteliti.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). Terdapat dua cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistika *kolmogrov-smirnov*.

Menurut Ghozali (2011), metode yang handal dalam uji normalitas adalah dengan mengamati *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal daripada dengan melihat grafik histogram. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik yaitu dengan melihat :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011).

Kelemahan yang dimiliki oleh metode grafik yaitu pengamatan visual dari grafik tersebut terkadang menyesatkan sehingga uji normalitas secara statistik perlu dilakukan. Uji asumsi yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Multikolonieritas dalam model regresi dapat dideteksi dengan melihat *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum adalah :

- a. Jika nilai *Tolerance* > 10 persen dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- b. Jika nilai *Tolerance* < 10 persen dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser adalah meregresikan absolute nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011).

Autokorelasi diuji dengan *run test*. *Run test* digunakan sebagai bagian dari statistik *nonparametric* dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 2011). Model

regresi dikatakan random atau acak jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dimana regresi linear berganda merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dirumuskan sebagai berikut :

$$PS = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 KM \times ACI + \beta_3 KM \times ACE + \beta_4 ACI + \beta_5 ACE + \beta_6 FSZE + \varepsilon$$

Keterangan :

PS	: Pengungkapan sukarela
KM	: Kepemilikan manajerial
ACI	: Independensi komite audit
ACE	: Keahlian komite audit
FSZE	: Ukuran perusahaan

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang akan dilakukan terdiri dari tiga bagian yaitu uji signifikansi simultan (uji F), koefisien determinasi (R^2) dan uji t (parsial).

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barros *et al.*, (2013) hipotesis diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 1 persen atau 0.01, 5 persen atau 0.05, dan 10 persen atau 0.10. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan

didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.01 , < 0.05 atau < 0.10 , maka hipotesis diterima. Ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0.01 , > 0.05 atau $> 0,10$, maka hipotesis ditolak. Ini berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R^2* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai *Adj R^2* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2011).

3.5.4.3 Uji t (parsial)

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila t hitung lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan yang berarti hipotesis diterima. Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh lebih kecil dari t tabel berarti hipotesis ditolak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barros *et al.*, (2013) pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0.01, 0.05 dan 0.10. Penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat dari masing-masing variabel. Apabila nilai signifikansi > 0.10 maka hipotesis ditolak dan sebaliknya jika nilai signifikansi < 0.10 maka hipotesis diterima.